

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Adami Chazawi. 2005. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- . 2008. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Amir Ilyas *et.al.* 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana II*. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Andi Sofyan dan Abd Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Kencana. Jakarta.
- Audya Mayasari dan Syarif Saddam Rlvanie. 2022. *Buku Ajar Hukum Pidana Perlindungan Anak*. Makassar: Nas Media Pustaka.
- Erdianto Effendi. 2014. *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*. PT. Refika Aditama. Bandung.
- H. Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*. Deepublish. Yogyakarta.
- Jonaedi Effendi. 2018. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*. Kencana. Jakarta.
- Leden Marpaung. 2009. *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta
- Maidin Gultom. 2012. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*. Refika Aditama. Bandung.
- Moeljatno. 2003. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. 2013. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Oly Viana Agustine. 2019. *Sistem Peradilan Pidana Suatu Pembaharuan*. Rajawali Pers. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang. 2013. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya. Bandung.
- Pipin Syarifin. 2000. *Hukum Pidana di Indonesia*. Pustaka Setia. Bandung.

- R. Soesilo. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia. Bogor.
- R. Tresna.1979. *Azas-azas Hukum Pidana Disertai Pembahasan Beberapa Perbuatan Pidana Yang Penting*. Tiara LTD. Jakarta.
- Rahmanuddin Tomalili. 2012. *Hukum Pidana*. CV. Budi Utama. Yogyakarta.
- Redaksi Sinar Grafika. 2015. *Amandemen Undang-Undang Perlindungan Anak (UU RI No.35 Tahun 2014)*. Sinar Grafika. Jakarta.
- Roeslan Saleh. 2008. *Sifat Melawan Hukum Dari Perbuatan Pidana*. Aksara Baru. Jakarta.
- Vilta Biljana Bernadethe Lefaan dan Yana Suryana. 2018. *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Deepublish. Yogyakarta.
- Zainuddin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika. Jakarta.

## **B. JURNAL/ARTIKEL MAJALAH ILMIAH**

- Devita Nur Muzdhalifatul Qibtiyah. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan yang Dilakukan Anak di Bawah Umur. *Jurnal Singaperbangsa Law Review*. Volume 1. Nomor 1. 2020
- Herman DM. Sejarah Pesantren di Indonesia. *Jurnal Al-Ta'dib*. Volume 6. Nomor 2. 2013.
- Ivo Noviana. Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya. *Jurnal Sosio Informa*. Volume 1. Nomor 1. 2015.
- Mansur Hidayat. Model Komunikasi Kyai dengan Santri di Pesantren. *Jurnal Komunikasi ASPIKOM*. Volume 2. Nomor 6. 2016.
- Rini Fitriani. Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*. Volume 11. Nomor 2. 2016.
- Rini Setyaningsih. Kontinuitas Pesantren dan Madrasah. *Jurnal At-Ta'dib*. Volume 11. Nomor 1. 2016.

### **C. MAKALAH**

Butje Tampi. 2010. *Kejahatan Kesusilaan dan Pelecehan Seksual Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. Manado.

### **D. KAMUS**

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Poerwardarminta. 1976. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Balai Pustaka. Jakarta.

### **E. SKRIPSI**

Ayindah Frisdayanti. 2021. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Secara Berlanjut Yang Dilakukan Oleh Guru Mengaji (Studi Kasus Putusan No.225/Pid.Sus/2016/PN.Pin)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Djoko Suryo.2000. *Tradisi Santri dalam Historiografi Jawa, Pengaruh Islam di Jawa*. Catatan Pada Seminar Pengaruh Islam Terhadap Budaya Jawa.

Rahmithasari Marwahputri. 2018. *Analisis Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 53/Pid.Sus/2017/PN.SKG)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

Sakinah Syafruddin. 2019. *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Tenaga Kependidikan Terhadap Murid (Studi Kasus Putusan Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN. Mks)*. Skripsi. Sarjana Hukum. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Makassar.

### **F. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 219, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6131).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6184).

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan dan Pemberian Restitusi dan Kompensasi Kepada Korban Tindak Pidana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 225).